



PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG

LAPORAN KINERJA

LKJ
2020

SOPPENGKAB.GO.ID

KECAMATAN MARIORIAWA



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng secara tepat waktu, begitu pula Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah ke Junjungan Rasulullah, Muhammad SAW.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKj), bahwa Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, dan kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng serta *Stakeholder* terkait, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan pencapaian Kinerjanya dimasa yang akan datang.

Watansoppeng, Februari 2021,

Camat Marioriawa,

USMAN ACHMAD, S. IP, M. Pd

NIP : 197111281992021002

Ringkasan Eksekutif

K

ecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 dari total Rp. 7.687.317.354 ,- nilai Anggaran yang termuat dalam DPA Kecamatan Marioriawa Tahun 2020 terserap dana APBD mencapai Rp. 7.508.591.394,- atau mencapai 97,68,%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2020 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 178.725.960,-.

Anggaran tersebut tersebar 2 (dua) Belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam uraian 4 (Empat) program kerja dan 31 (Tiga Satu) kegiatan sebagai penopang pelaksanaan fungsi Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan penopang pencapaian kinerja Kecamatan Marioriawa Tahun 2020.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2020 untuk mewujudkan kinerjanya adalah:

1. Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan dengan predikat “Sangat Memuaskan” dengan capaian 100% dari 1 Urusan yang ditargetkan terealisasi 100%.
2. Persentase Capaian Kinerja IKU perangkat daerah dengan predikat “Memuaskan” dengan capaian 100% dari 1 Urusan yang ditargetkan terealisasi 100%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :	5
2. Struktur Organisasi	11
1.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13
1.4. Sistematika Penyajian	14
1. Bab Pendahuluan	14
2. Bab Perencanaan Kinerja	14
3. Bab Akuntabilitas Kinerja	14
4. Bab Penutup	15
5. Lampiran	15
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
1. Perjanjian Kinerja	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
3. Program dan Kegiatan	19
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Organisasi	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
BAB IV	40
PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Marioriawa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan secretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Pelaksanaan, pengoorkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan;

- Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretaris Camat

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlakudan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan

melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bidang umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. *Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan*

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala seksi pemerintahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pemerintahan umum;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan seksi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan dan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala seksi perekonomian

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksiperekonomian;

- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Marioriawa terdiri dari :

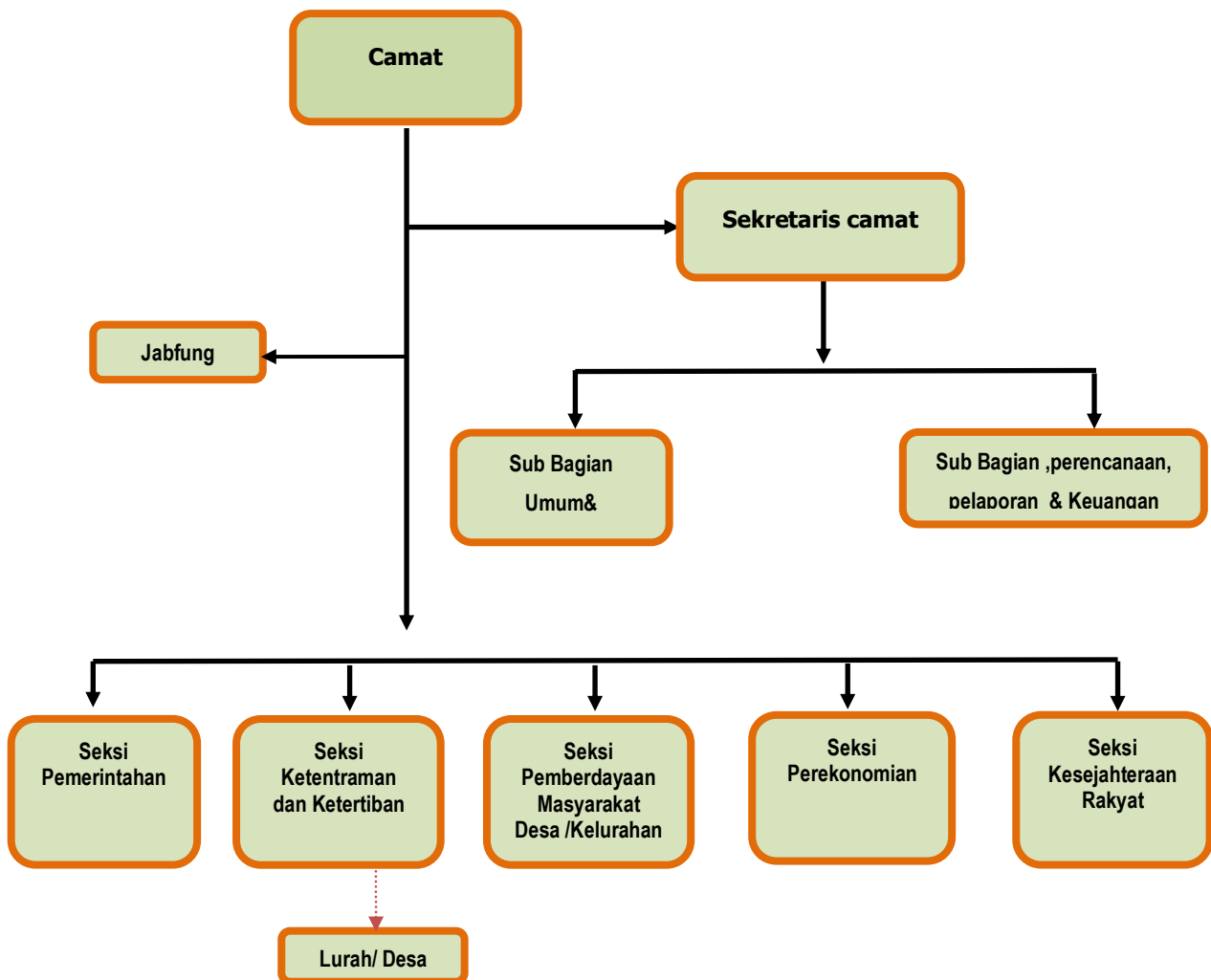
1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi – Seksi
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

KECAMATAN MARIORIAWA

- d. Seksi Perekonomian
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Marioriawa



KECAMATAN MARIORIAWA

Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Marioriawa Tahun 2020 sebanyak 49 orang. Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Marioriawa dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	6
2	Sarjana (Strata I)	43
3	Diploma (D III)	1
4	SLTA	6
5	SMP	0
J u m l a h		56

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2020

Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	45
3	Golongan II	7
4	Golongan I	0
J u m l a h		56

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2020

Berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / PIM IV	18
J u m l a h		20

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Marioriawa Tahun 2020

1.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Marioriawa tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder;
- b. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya

Faktor penghambat antara lain:

- a. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan;
- b. Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa;
- b. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini terdiri atas:

- a. Latar Belakang
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

2. Bab Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang Bersangkutan.

3. Bab Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Lampiran pada Laporan Kinerja ini terdiri dari:

- a. Lampiran pertama berupa dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Marioriawa Tahun 2020;
- b. Lampiran kedua berupa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Marioriawa Tahun 2020;
- c. Lampiran ketiga berupa Matriks Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Mariorawa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	%	80	100
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	%	100	100

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Mariorawa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	%	100	100
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	%	100	100

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja tahun 2019 antara kepala Camat Marioriawa Kabupaten Soppeng dengan bapak bupati soppeng dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang ditandatangani kedua belah pihak.

Tabel 2.4 Kecamatan Marioriawa telah menetapkan PK sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan		
		Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan		
		Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ihtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kecamatan Marioriawa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Marioriawa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan

3. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan Marioriawa merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
1	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	Penyediaan bahan logistik kantor	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
2	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	
	Bupati menyapa	
	Penyuluhan Kamtibmas	
	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	
	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	

KECAMATAN MARIORIAWA

	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	
	Pembinaan kader posyandu kelurahan	
	Penyelenggaraan kecamatan sehat	
	Penyusunan Profil kelurahan	
4	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	
	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Kecamatan Marioriawa Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	

Pada table diatas, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Dengan persentase yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan sebesar 100 % dan Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah sebesar 100%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran-1

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan

Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor Camat Mariorawa, memiliki satu sasaran. Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	

Sasaran I yaitu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dengan indicator Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, dimana urusan pemerintahan kecamatan yang dimaksud adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Hal ini dilaksanakan dengan mengacu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), untuk memastikan terselenggaranya Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum kepada masyarakat kecamatan Marioriawa telah melakukan pelayanan berupa perizinan dan non perizinan dengan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan melalui musrembang yang setiap tahun dilaksanakan.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan penyuluhan kantibmas di wilayah kecamatan Marioriawa dengan realisasi 12 kali dalam 1 tahun sesuai target yang ditetapkan.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hal ini telah dilakukan dengan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Marioriawa kepada bupati.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam hal ini sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dan melaporkan kepada bupati terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Marioriawa.
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dengan kegiatan pengelolaan dana ADD desa yang mana dibentuk tim pengawas dari kecamatan

untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah kecamatan Marioriawa.

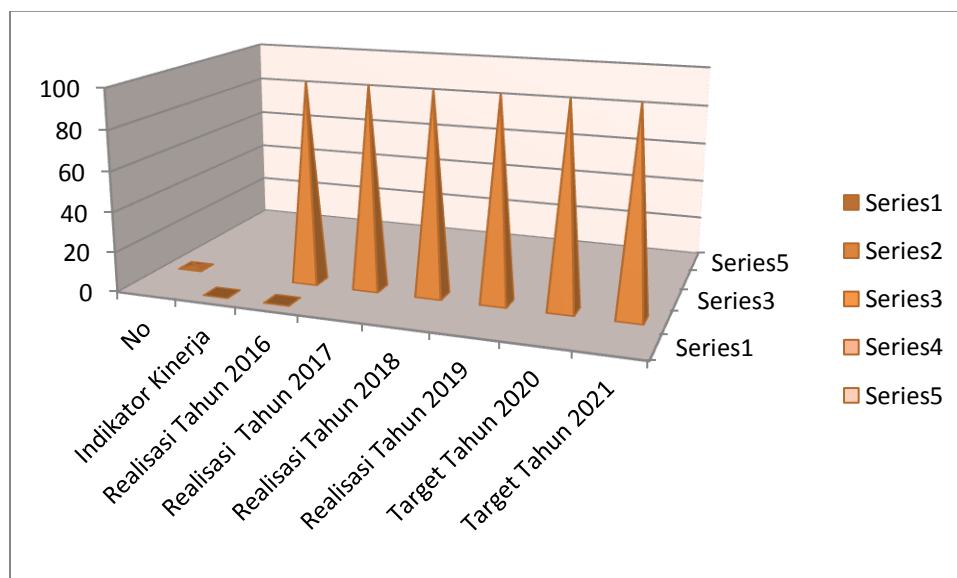
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan seperti pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat, bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi lebih sebagai suatu keharusan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut merupakan suatu upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan mekanisme otonomi daerah.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan disini dimaksudkan adalah program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan kecamatan yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan, program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

Dari target 8 Urusan yang dilakukan kecamatan Marioriawa dapat terealisasi sebesar 8 Urusan dengan capaian sebesar 100%. jadi dari satu indicator sasaran tersebut dapat dikatakan bahwa capaian kinerja telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan dengan persentase diatas 90 persen.

B. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu sasaran-1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran ini dari tahun ke tahun dapat terlaksana.

C. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sasaran-1

N O	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Capaian
1	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja sasaran dengan indicator persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan telah mencapai target tiap tahunnya yaitu 100%. Meskipun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
 - kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan administrasi dan pengarsipan dokumen.
 - Belum tersedianya fasilitas penunjang kegiatan administrasi
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melalui musrembang desa/kelurahan maupun kecamatan.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - kerjasama antara pihak aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama masih kurang

- Di wilayah kecamatan Marioriawa memiliki beberapa daerah yang sulit dijangkau untuk melakukan penyuluhan terkait ketentraman dan ketertiban
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan masih kurang
- 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan:
 - Masih ada beberapa kegiatan yang belum terintegritas perangkat daerah dengan instansi vertikal terkait.
 - Pelaksanaan kegiatan belum sesuai betul dengan perencanaan
- 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
 - Ada 2 Desa yang ada di wilayah kecamatan Marioriawa yang sulit dijangkau kendaraan umum sehingga belum maksimal pengawasan yang dilakukan dari kecamatan Marioriawa.
 - Pengawasan dilakukan oleh kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
- 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
 - Standar pelayanan minimal belum sepenuhnya terlaksana
 - kewenangan yang diatur masih bersifat umum (kewenangan atributif)
- 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.6 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-1

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Ket
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	3.432.835.180	3.293.235.810	95,93	100	97,96

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan adalah sebesar Rp. 3.432.835.180,- dengan realisasi Rp. 3.293.235.810,- dengan persentase 95,93%, sedangkan capaian kinerjanya 100%. Karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-1 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan**, meliputi;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan

Kegiatan :

- Bupati Menyapa
- Penyuluhan Kantibmas
- Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
- Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan dan Penghulu Syara
- Pendampingan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
- Pendampingan Kader Posyandu
- Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
- Profil Kelurahan

2. Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan

KECAMATAN MARIORIAWA

- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Sasaran-2**Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan****a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Tabel 3.7 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Hasil Capaian Target	Persen (%)	Ket
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	

Sasaran II yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan kecamatan, dengan indicator Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, dimana urusan pemerintahan kecamatan yang termasuk pada sasaran II ini adalah :

1. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum hal ini bisa melibatkan beberapa pihak swasta untuk membantu dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah dengan target pada tahun 2020 yaitu 1 jumlah urusan realisasi 1 jumlah urusan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sehingga dari satu indikator tersebut dapat dikatakan telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan dengan persentase diatas 90% capaian kinerjanya.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.8 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2020 dengan realisasi sebesar 100%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.9 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sasaran-2

	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Realisasi tahun 2020	Capaian
1	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja sasaran strategis dengan indikator Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah tercapai 100% karena program rutin kecamatan dapat terlaksana dengan baik

Meskipun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

1. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Masalah yang seringkali dihadapi adalah:

- kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga prasarana dan sarana pelayanan umum

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-2

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Keterangan
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	931.766.354	880.103.100	99,38%	100	99,69

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan adalah sebesar Rp. 931.766.354,- dengan realisasi Rp. 880.103.100,- dengan persentase 99,38%, sedangkan capaian kinerjanya 100%. karena realisasi capaian kinerja lebih besar dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dengan indikator kinerja sasaran **Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah**, meliputi;

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Kegiatan :

- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan layanan kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan

Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

A. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng terdiri atas dua bagian yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2021				
NO	JENIS BARANG	Tahun 2020		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN
1	Belanja Tidak Langsung a. Gaji dan Tunjangan	3.322.716.320	3.335.310.984	100,38%
		3.322.716.320	3.335.310.984	100,38%
2	Belanja Langsung	4.364.601.034	4.173.280.410	95,62%
	a. Belanja Pegawai	0	0	%
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.435.812.154	2.272.786.600	93,31%
	c. Belanja Modal	1.928.788.880	1.900.493.810	98,53%
JUMLAH TOTAL		7.687.317.654	7.508.591.394	97,68%

Belanja Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. **7.687.317.654,-** yang terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung Rp. 3.322.716.320,- dan Belanja Langsung Rp. 4.364.601.034 ,- Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.335.310.984,-atau 98.00% yang terdiri dari i) Gaji dan tunjangan, realisasi belanja tidak langsung tahun 2020 mencapai 100,38%. Belanja Langsung Terealisasi sebesar Rp. 4.173.280.410 ,- atau 95,62% dari rencana sebesar Rp. 4.364.601.034,-, Belanja Langsung terdiri dari:i) Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 0,- dan realisasinya Rp. 0,- atau mencapai 0%; ii) Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 2.435.812.154,- dan realisasinya Rp 2.272.786.600,- atau mencapai 93,31%; iii) Belanja Modal dengan alokasi anggaran Rp. 1.928.788.880,- dan realisasinya Rp. 1.900.493.810,- atau mencapai 98,53% realisasi Belanja Langsung tahun 2020 mencapai 97,68%.

Untuk mengetahui target dan realisasi belanja program prioritas tahun 2020 dapat dilihat pada *table 3.7* berikut

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Program Prioritas tahun 2020

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Anggaran tahun 2020 (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	652.230.000	637.277.000	97,70
			Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	2,780.605.180	2.655.958.810	95,51

	yang dilimpahkan					
2	Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator, koordinator dan mediator (S4)	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	931.766.354	880.103.100	99,38

Adapun rincian rencana dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020, sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA%	SISA
1	2		3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan		931.766.354	880.103.100	99	51.663.254
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		118.616.000	111.181.800	93	7,434,200
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		2.250.000	1.858.250	82	391,750
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor		39.090.000	39.043.000	99	47,000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.832.500	5.828.500	99	0
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.410.000	2.410.000	100	0
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		158.137.800	149.174.400	94	8,963,400
7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		345.915.754	341.873.800	98	4,041,954
8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		99.144.200	96.950.000	97	2,194,200
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		19.625.000	19.366.500	98	258,500

KECAMATAN MARIORIAWA

	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103.545.100	75.292.850	72	28,252,250
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.200.000	22.180.000	99	20,000
	12	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.940.000	98	60,000
2	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	-
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	-	-	-	-
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan		652.230.000	637.277.000	97	14.953.000
	1	Bupati Menyapa	0	0	0	0
	2	Penyuluhan Kamtibmas	15.600.000	15.600.000	100	0
	1	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	8.200.000	8.200.000	100	0
	2	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	280.200.000	265.800.000	94	14,400,000
	3	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	169.680.000	169.680.000	100	0
	4	Fasilitasi Kader Posyandu	127.500,000	127,500,000	100	0
	5	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	16.050.000	16.050.000	100	0
	1	Penyusunan Profil kelurahan	35.000.000	34.447.000	98	553.000.00
4	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan		2.780.604.680	2.655.958.810	95	124.646.370
	1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	21,600,000	21,600,000	100	-
	2	Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	374,000,100	348,455,000	93	25,545,100
	3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	197,032,116	197,032,116	100	-
	4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	339,166,116	339,166,116	100	-

KECAMATAN MARIORIAWA

5	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	935,806,848	935,755,578	99	51.270
6	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	0	0	95	
7	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	0	0	100	-
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	0	0	100	-
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	13,000,000	12,350,000	99	650.000
10	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	0	0		0
11	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	900,000,000	801,600,000	89	98.400.000
	JUMLAH	4.364.601.034	4.173.280.410	97	199,770.624

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Marioriawa Tahun 2020 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kecamatan Marioriawa atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). LKj Kecamatan Marioriawa Tahun 2020 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 4 Program yang dilaksanakan Kecamatan Marioriawa sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan LKj Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2020 dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja outcome yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020.
2. Secara umum, capaian Kinerja Kecamatan Marioriawa Tahun 2019 memperlihatkan hasil yang memuaskan. Dalam Indikator Kinerja Utama 2019 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 indikator sasaran strategis, dari 2 indikator tersebut telah memenuhi target.

Batu-Batu, Februari 2021
Camat Marioriawa,

USMAN ACHMAD, S. IP, M. Pd
NIP. 19711128 199202 1 002

Lampiran – Lampiran

